

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan di Indonesia mengalami pergeseran paradigma dari sentralistik menjadi desentralistik. Pada masa Orde Baru, urusan-urusan daerah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Setelah adanya reformasi, urusan daerah diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Kedua undang-undang tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dalam mengatur urusan daerah. Pada masa Orde Baru, Indonesia menerapkan sistem tata kelola pemerintahan yang sentralistik dengan asas otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dimana daerah memiliki kewenangan yang sangat terbatas dan diatur secara ketat oleh pemerintah pusat, serta menerapkan konsep penyeragaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat hierarkis dimana pemerintah pusat memiliki kontrol penuh atas keputusan yang diambil daerah. Pembangunan daerah juga sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan lokal karena semua keputusan diambil di tingkat pusat yang tidak tahu menahu mengenai kondisi masyarakat sebenarnya (Suriadi et al., 2023).

Memasuki masa reformasi dan dengan adanya semangat reformasi, sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia berubah menjadi desentralistik dengan berpedoman pada asas otonomi yang seluas-luasnya, dimana

pemerintah pusat memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal dengan menekankan pada konsep desentralisasi. Hubungan pemerintah pusat dan daerah menjadi tidak terikat dan pembangunan daerah menjadi lebih efisien karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal (Suriadi et al., 2023).

Desentralisasi dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan (*transfer of authority*) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Hal ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan daerah secara tepat dan efektif, karena setiap daerah memiliki kondisi dan permasalahan yang berbeda-beda. Maka dari itu, pemerintah daerah dianggap lebih mampu untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan karakteristik dari permasalahan lokal (Domai, 2011)

Sejarah desentralisasi di Indonesia dimulai setelah masa reformasi yang ditandai dengan pengesahan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi dominasi pemerintah pusat dengan pemberian kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan pelayanan publik. Menyempurnakan kebijakan sebelumnya, terjadi perubahan UU No. 22/1999 menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dimana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 yang dimaksudkan sebagai bentuk penyempurnaan kebijakan sebelumnya. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik maupun penguatan daya saing daerah (Suriadi et al., 2023).

Sejalan dengan prinsip desentralisasi, otonomi daerah merupakan wujud konkret dari pelaksanaan desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Melalui regulasi tersebut, setiap daerah otonom kabupaten/kota diberikan kewenangan, hak, dan tanggung jawab untuk mengatur serta mengelola kepentingan masyarakatnya secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Singka et al., 2011).

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, lahir sebagai respons terhadap asas otonomi daerah yang seluas-luasnya. Dengan adanya undang-undang ini, desa memperoleh kewenangan yang lebih besar untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri, dengan berlandaskan pada hak asal-usul serta nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat desa. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa membidangi empat bidang urusan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Purwanti, 2019).

Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 12 mendefinisikan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Desentralisasi dan otonomi daerah secara normatif telah diperkuat melalui berbagai regulasi dan dinamika tata kelola pemerintahan. Namun, dewasa ini tata kelola pemerintahan menunjukkan adanya kecenderungan penguatan kembali peran pemerintah pusat atau resentralisasi melalui konsolidasi kebijakan nasional dan penetapan fiskal. Kebijakan *refocusing* anggaran serta penetapan prioritas pembangunan berbasis agenda strategis nasional berdampak pada terbatasnya ruang diskresi daerah dan desa dalam menentukan arah pembangunan secara mandiri. Dalam konteks tersebut, relasi pusat dan daerah tidak lagi sepenuhnya mencerminkan pola desentralistik yang luas, melainkan menunjukkan indikasi resentralisasi dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah dan desa untuk semakin adaptif, inovatif, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar tetap dapat menjalankan fungsi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara efektif.

Pemberdayaan masyarakat merupakan elemen strategis dalam mewujudkan masyarakat desa yang mandiri, inovatif, dan kreatif dalam berbagai dimensi kehidupan (Kushandajani dalam Azwardi, 2004). Dalam kerangka tersebut, pemberdayaan masyarakat berperan penting dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan desa wisata melalui penguatan kerja sama, peningkatan pengetahuan, pengembangan keterampilan, serta kemandirian yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Program pemberdayaan pada dasarnya dirancang untuk mengoptimalkan kembali potensi desa melalui pelibatan masyarakat secara aktif dan menyeluruh (Sumodiningrat, 2007). Dengan demikian, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga berperan sebagai aktor utama dalam proses pemberdayaan itu sendiri. Konsep ini sejalan dengan perubahan paradigma dari “membangun desa” menjadi “desa membangun”, dimana paradigma ini menekankan bahwa desa menjadi subjek pembangunan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan di wilayahnya secara mandiri.

Perencanaan program pemberdayaan masyarakat desa perlu menerapkan pendekatan *bottom-up*, karena pada hakikatnya pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan masyarakat mampu berperan aktif dalam memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi di tingkat desa secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berfungsi sebatas sebagai fasilitator serta regulator, sedangkan pengelolaan program

pembangunan desa dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah desa dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa. Dengan adanya paradigma ini, desa didorong untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan sumber daya lokal serta desa didorong untuk memberdayakan masyarakatnya agar pembangunan dapat berhasil (Laily, 2015)

Upaya pemberdayaan masyarakat tentu sangat membutuhkan adanya partisipasi masyarakat dimana keduanya saling berhubungan satu sama lain. Partisipasi mencerminkan kesediaan masyarakat untuk terlibat dan berkontribusi dalam setiap program maupun kegiatan pembangunan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, partisipasi dimaknai sebagai bentuk peran serta dan keterlibatan aktif masyarakat dalam suatu kegiatan. Adiyoso dalam Dewi et., al (2024) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur fundamental dalam upaya mendorong kemandirian serta pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengabaian terhadap aspek partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata berpotensi besar menghambat, bahkan menyebabkan kegagalan, dalam proses pengelolaannya.

Konsep partisipasi masyarakat mengacu pada keterlibatan individu atau kelompok dalam serangkaian aktivitas yang efektif dalam proses perencanaan sampai dengan proses pengambilan keputusan, sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan dari kegiatan yang telah direncanakan. Pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat menunjukkan hubungan yang saling berhubungan

satu sama lain sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan (Dewi et al., 2024), hubungan antara pemberdayaan dan partisipasi masyarakat menunjukkan adanya korelasi positif, yang mengindikasikan bahwa semakin efektif proses pemberdayaan yang dilaksanakan, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan perlu dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembangunan serta pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dan memiliki daya saing.

Desa wisata dapat dijelaskan sebagai sebuah konsep yang mengintegrasikan potensi daya tarik wisata dalam sebuah desa, termasuk wisata alam dan budaya lokal menjadi sebuah obyek wisata. Hadiwijono dalam Istiyanti (2020) mendefinisikan desa wisata sebagai suatu kawasan pedesaan yang mempertahankan keaslian dan kekhasan suasanaanya, baik dari aspek kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, maupun pola kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Selain itu, desa wisata dicirikan oleh keberadaan arsitektur bangunan serta tata ruang desa yang khas, aktivitas ekonomi yang menarik, serta beragam potensi yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata, seperti atraksi, akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, hingga berbagai kebutuhan pendukung pariwisata lainnya.

Gumelar dalam Chaerunissa dan Yuningsih (2020) menjelaskan bahwa pengembangan desa wisata bertujuan untuk 1) mengidentifikasi jenis pariwisata yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi masyarakat setempat, 2)

memberdayakan masyarakat lokal agar mampu merencanakan dan mengelola potensi wilayahnya secara mandiri, 3) mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait bentuk dan arah pengembangan pariwisata, 4) meningkatkan kapasitas kewirausahaan masyarakat, dan 5) mengembangkan produk-produk wisata berbasis potensi desa.

Ditinjau dari aspek kebermanfaatannya, desa wisata memiliki potensi untuk meningkatkan sekaligus memperbaiki kondisi perekonomian suatu daerah. Hal ini sejalan dengan pandangan Sidiq dan Resnawaty dalam Nurwanda (2022) yang menegaskan bahwa pengembangan desa wisata berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal agar mampu mengelola serta mengarahkan pemanfaatan aset-aset yang dimiliki desa guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Dengan memberdayakan masyarakat, mereka dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola usaha pariwisata, seperti homestay, kuliner, pemandu sejarah, dan kerajinan tangan, yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi mereka. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga berkontribusi pada pelestarian budaya dan lingkungan, karena masyarakat terdorong untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya serta ekosistem setempat sebagai daya tarik bagi wisatawan. Dengan demikian, pengembangan desa wisata yang berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat tidak hanya membuka peluang peningkatan ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat identitas sosial dan budaya masyarakat lokal.

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata perlu diiringi dengan keterlibatan para pemangku kepentingan pada setiap tahapan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pengembangan desa wisata tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi antara akademisi, sektor bisnis, masyarakat lokal, pemerintah, dan media yang masing-masing menjalankan peran strategisnya. Sinergi dari berbagai pihak tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan (Khusniyah dalam Sadat et al., 2023).



Gambar 1.1 Model Penta Helix dalam Pengembangan Desa Wisata

Sumber : diadaptasi dari Sadat et al., (2023)

Dalam kerangka penta helix, pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator yang menyusun kebijakan, menetapkan arah pengembangan, serta menyediakan dukungan pendanaan dan infrastruktur. Akademisi berkontribusi melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan berbasis riset, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Sektor bisnis

berperan sebagai enabler ekonomi melalui investasi, inovasi produk, serta penciptaan peluang usaha yang berorientasi pasar. Masyarakat lokal menjadi aktor utama sekaligus pemilik sumber daya wisata yang berperan dalam pengelolaan, pelestarian nilai budaya, serta penyediaan layanan wisata. Sementara itu, media memiliki fungsi strategis dalam promosi, publikasi, dan pembentukan citra destinasi melalui penyebaran informasi atau konten yang masif dan berkelanjutan.

Keberhasilan implementasi model penta helix dalam pengembangan desa wisata tidak hanya ditentukan oleh kejelasan peran masing-masing aktor, tetapi juga oleh kuatnya modal sosial (*social capital*) yang menopang hubungan antar pemangku kepentingan. Modal sosial merujuk pada jaringan, kepercayaan (trust), norma bersama, serta nilai kolektif yang memungkinkan terjadinya kerja sama secara efektif dan berkelanjutan (Pamungkas dan Budi dalam Supratiwi 2013). Dalam konteks pengembangan pariwisata berbasis desa, kepercayaan antar masyarakat, pemerintah desa, pelaku usaha, dan pihak eksternal menjadi prasyarat penting dalam membangun komitmen jangka panjang.

Jaringan sosial memperluas akses terhadap informasi, sumber daya, serta peluang kolaborasi, sedangkan norma dan nilai bersama memperkuat rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga keberlanjutan destinasi wisata. Dengan demikian, modal sosial berfungsi sebagai fondasi yang memperlancar koordinasi, meminimalkan konflik kepentingan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa wisata. Tanpa

dukungan modal sosial yang kuat, sinergi antar aktor dalam kerangka penta helix berpotensi dapat menghambat pengembangan desa wisata.

Hendryantoro (2014) menyatakan bahwa pengembangan desa wisata berbasis budaya yang menitikberatkan pada pemanfaatan potensi sosial dan budaya lokal diyakini mampu memperkuat ketahanan sosial budaya masyarakat setempat. Keunggulan dan keunikan budaya yang ada pada suatu daerah di desa wisata dapat menjadi suatu nilai tambah yang dapat ditawarkan. Nurwanda dalam Simamora dkk. (2016) menyampaikan bahwa pengembangan desa wisata yang bertumpu pada karakteristik kealamian serta dinamika sosial budaya masyarakat yang meliputi keunikan, keindahan alam, dan kekayaan budaya dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung. Salah satu desa wisata yang merepresentasikan karakteristik tersebut adalah Desa Wisata Noyo Gimbal View yang berada di Desa Bangsri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Desa

Wisata Bangsri telah mengalami transformasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, Pemerintah Desa Bangsri menciptakan destinasi wisata Kampung Pelangi yang diresmikan pada 9 September 2020 sebagai inisiatif Pemerintah Desa Bangsri untuk meningkatkan perekonomian lokal dan mengubah citra desa yang tergolong miskin dan tertinggal. Pembangunan Kampung Pelangi ini di gagas oleh Kepala Desa Bangsri, Laga Kusuma, yang terinspirasi dari kampung pelangi yang ada di Semarang dan Malang. Pembangunan Kampung Pelangi ini disambut antusias dan suka cita

oleh warga setempat. Pada saat tahap pengerjaan Kampung Pelangi di mulai, puluhan warga terlibat secara aktif bergotong royong untuk menciptakan kampung yang meriah dan berwarna-warni. Para pemilik rumah menghias rumah mereka dengan cat warna yang bervariasi dan mereka juga membuat gambar berbagai motif seperti bunga, tokoh kartun, bahkan wajah kepala desa mereka pada bagian dinding rumah. Pada awalnya, banyak yang meragukan keberhasilan Kampung Pelangi dalam menarik kunjungan wisatawan. Namun, dengan kerja keras dari tim kreatif, tim marketing dan seluruh pemuda Desa Bangsri, Kampung Pelangi mampu menjual sebanyak 52 ribu tiket masuk dalam satu bulan dan berhasil mencapai omzet sebesar Rp70.000.000 per bulan. Sayangnya, Kampung Pelangi hanya bertahan empat bulan setelah diresmikan akibat dihantam pandemi dan manajemen wisata yang buruk. Menurut POKDARWIS Desa Bangsri, SDM di Karang Taruna Desa Bangsri kurang memiliki kapasitas dalam mengelola tempat wisata. Pada awalnya, pengelolaan wisata Kampung Pelangi ini ditangani oleh BUMDes dengan struktur manajemen yang jelas, termasuk adanya sistem pengawasan tata kelola. Namun, pengelolaannya kemudian dialihkan kepada Karang Taruna pedukuhan. Karena Karang Taruna merupakan lembaga kepemudaan, bukan lembaga usaha, prinsip-prinsip manajemen pariwisata tidak diterapkan secara optimal. Hal ini diakui oleh Kepala Desa Bangsri, Laga Kusuma, yang menyebutkan bahwa kurangnya pengalaman dalam mengelola wisata menyebabkan tata kelola menjadi kurang teratur dan tidak terarah. Akibatnya,

inovasi-inovasi atraksi wisata sulit muncul dan desa wisata sulit untuk berkembang.

Kegagalan Kampung Pelangi membawa pelajaran yang berharga bagi Pemerintah Desa Bangsri. Pada tahun 2022, Desa Bangsri bangkit dan mencoba meluncurkan inovasi baru dengan membuka destinasi Agrowisata Petik Buah melalui BUMDes Maju Mapan yang diresmikan pada 19 Juni 2022. Inovasi ini memanfaatkan lahan kas desa seluas sekitar dua hektar yang ditanami dua varietas semangka, yaitu semangka merah dan semangka inul. Agrowisata ini menyuguhkan pengalaman memetik semangka langsung dari kebun dan setelah memetik, pengunjung dapat menimbang sendiri hasil panennya sebelum dilakukan perhitungan harga. Selain itu, pengunjung juga dapat menyaksikan inovasi dalam bidang pertanian modern di Desa Bangsri, seperti penggunaan drone untuk proses penyiraman tanaman semangka, yang membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil panen. Kepala Desa Bangsri, Laga Kusuma, menyatakan bahwa agrowisata ini akan terus berkolaborasi dengan petani setempat untuk menanam berbagai jenis buah sesuai musim, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan petani dan menarik lebih banyak wisatawan. Meskipun telah sukses menyelenggarakan dua kali panen semangka, agrowisata ini belum mampu berkembang secara signifikan. Salah satu faktor utama yang memengaruhi adalah kondisi pasca pandemi, di mana pemulihan ekonomi masih berlangsung secara perlahan. Dalam situasi tersebut, daya beli masyarakat, minat wisatawan, serta investasi dalam sektor pariwisata

dan pertanian belum sepenuhnya pulih, sehingga menghambat pertumbuhan dan perluasan agrowisata di Desa Bangsri.

Pada tahun 2023, Kepala Desa Bangsri, Laga Kusuma ingin kembali mencoba membuat desa wisata dengan konsep baru yang memadukan antara alam dan sejarah lokal yang dinamai dengan wisata Noyo Gimbal View. Nama "Noyo Gimbal" diambil dari tokoh lokal, Noyo Sentiko, yang merupakan seorang pejuang abad ke-18 yang dikenal dengan rambut gimbalnya dan perjuangannya melawan penjajah Belanda. Namun, hal ini tidak serta merta berhasil begitu saja karena pada saat tahap perintisan, pemerintah desa tidak mendapat dukungan yang signifikan dari warga. Mayoritas warga saat itu lebih menginginkan anggaran desa dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, daripada pengembangan sektor wisata. Berangkat dari kenekatan dan komitmen untuk menjadikan Desa Bangsri menjadi sebuah desa wisata yang layak, akhirnya Pemerintah Desa Bangsri menggunakan modal yang terbatas dari dana desa untuk mengubah lahan bengkok seluas 1,8 hektare menjadi destinasi wisata dan mengajak sepuluh investor untuk bekerjasama dalam mendanai pembangunan destinasi wisata di Wisata Noyo Gimbal View Bangsri.

Belajar dari pengalaman sebelumnya, dalam pengelolaan wisata Noyo Gimbal, pemerintah desa lebih mematangkan manajemen wisata dengan menguatkan peran *stakeholders* dalam pengembangan kawasan Wisata Noyo Gimbal View. Pemerintah desa melalui BUMDes membuka kesempatan bagi

warga yang memiliki modal untuk berinvestasi dalam bentuk pembangunan kedai di kawasan wisata. Sebagai bentuk dukungan dari pemerintah desa, tanah disediakan tanpa biaya sewa, namun pembangunan kedai harus mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh BUMDes agar sesuai dengan konsep pengembangan wisata. Hasilnya, sejak di resmikan pada Juni 2023, lahan seluas 1,8 hektare tersebut kini telah terdapat 15 wahana, 24 kedai UMKM, dan 2 café yang dapat dinikmati oleh para wisatawan.

Inovasi yang diterapkan dalam pengelolaan Wisata Noyo Gimbal View terbukti membuahkan hasil yang positif. Dalam kurun waktu dua tahun sejak Wisata Noyo Gimbal berjalan, hasil penjualan tiket dan pengelolaan parkir per Januari 2025 di wisata tersebut telah mencapai 1,3 miliar lebih. Dalam satu bulan, destinasi wisata ini mampu menyumbang Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp35.000.000 setelah dikurangi berbagai biaya operasional, termasuk pembayaran gaji karyawan yang mencapai total Rp200 juta per bulan. Wisata Noyo Gimbal juga telah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Pada awal tahun 2024, desa wisata ini baru memberdayakan sekitar 70-80 orang untuk membantu mengelola desa wisata. Namun, per Januari 2025, warga yang diberdayakan bertambah sebanyak 2 kali lipat, terhitung 156 pegawai melalui BUMDes Maju Mapan dan 24 pelaku UMKM telah diberdayakan dalam mendukung pengelolaan wisata. Selain memberikan manfaat ekonomi bagi desa, pendapatan dari sektor wisata ini juga digunakan untuk mendukung berbagai program sosial, seperti pemberian bantuan bulanan bagi janda,

penyandang disabilitas, serta guru ngaji yang belum menerima tunjangan dari pemerintah.

Sejak dibuka untuk umum pada Juni 2023, Wisata Noyo Gimbal View di Desa Bangsri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, telah mengalami peningkatan jumlah pengunjung yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, destinasi wisata ini mencatat total kunjungan sekitar 120.000 wisatawan. Angka ini meningkat tajam pada tahun 2024, dengan total kunjungan mencapai 500.000 wisatawan. Puncaknya terjadi pada awal tahun 2025, di mana dalam satu hari tercatat 14.600 pengunjung. Secara rata-rata, jumlah pengunjung harian berkisar antara 12.000 hingga 14.000 orang. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Noyo Gimbal View telah menjadi destinasi wisata yang semakin diminati, baik oleh wisatawan lokal maupun luar daerah.

Wisata Noyo Gimbal View mempunyai konsep yang menarik dengan menyajikan pemandangan persawahan, aktivitas pertanian, wisata kuliner dan berbagai wahana bermain yang dapat dinikmati secara bersamaan. Desa Wisata ini juga memanfaatkan momentum dan digitalisasi secara efektif untuk menarik wisatawan. Desa Wisata Bangsri selalu mengadakan *event* yang belum pernah diselenggarakan di Blora sebelumnya, seperti mengadakan festival penerbangan lampion saat Waisak. Dengan memanfaatkan berbagai media sosial, mulai dari TikTok dan Instagram, tiket festival lampion habis terjual hanya dalam beberapa hari saja. Dengan inovasi-inovasi inilah yang membuat

Wisata Noyo Gimbal View terus berkembang dan memperluas wahana yang ditawarkan kepada pengunjung.

Wisata Noyo Gimbal View yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menunjukkan perkembangan yang cukup pesat melalui pemanfaatan berbagai potensi lokal yang dimiliki. Potensi tersebut meliputi potensi alam, kebudayaan, serta nilai budaya yang menjadi identitas desa, didukung oleh keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek pemberdayaan. Optimalisasi potensi-potensi tersebut tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor pariwisata desa, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan skor dan Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Bangsri dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai IDM tersebut berjalan seiring dengan perkembangan Desa Bangsri dan perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat setempat.

Tabel 1.1 Skor dan Status Indeks Desa Membangun

Tahun	Skor	Status
2023	0.6873	Berkembang
2024	0.7095	Maju
2025	0.8000	Mandiri

Sumber : Pemerintah Desa Bangsri

Naiknya skor Indeks Membangun Desa (IDM) tersebut mencerminkan kemampuan Desa Bangsri dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara bertahap seiring dengan berkembangnya Desa Wisata Noyo Gimbal View. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti tertarik untuk dapat mengetahui bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada Desa Bangsri

sehingga dapat mengembangkan desanya menjadi desa wisata yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dalam menuju pengembangan Desa Wisata Noyo Gimbal View Bangsri?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Noyo Gimbal View Bangsri?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Noyo Gimbal View Bangsri.
2. Mengetahui partisipasi masyarakat Desa Bangsri terhadap berbagai program pemberdayaan yang telah dilakukan dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Noyo Gimbal View Bangsri.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah

Peneliti berharap dapat memberikan manfaat dan saran bagi pemerintah desa selaku fasilitator dan eksekutor agar mampu mengelola dan memaksimalkan potensi Desa Wisata Noyo Gimbal View Bangsri dengan optimal serta mampu bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan desa wisata yang berkelanjutan.

2. Bagi masyarakat

Peneliti berharap penulisan penelitian ini dapat dijadikan sebagai motivasi untuk terus menjaga dan melestarikan Desa Wisata Noyo Gimbali View Bangsri dan memotivasi untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan desa wisata, sehingga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa saling memiliki terhadap lingkungan mereka. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada topik yang sama.

3. Bagi peneliti

Peneliti memperoleh pengalaman yang berharga serta pengetahuan yang bermanfaat untuk pengembangan kemampuan akademik dan profesional di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan wawasan, keterampilan, dan pemahaman peneliti terkait metode dan proses penelitian.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti telah melakukan tinjauan terhadap penelitian sebelumnya dengan meringkas dari artikel penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa wisata. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan acuan dalam penulisan penelitian ini :

1. Hidayatullah, Fitra Ayuningtyas, dan Tri Suminar. 2021. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Candi Plaosan Melalui Program Desa Wisata Untuk Kemandirian Ekonomi di Desa Bugisan

Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten. *Lifelong Education Journal*. Vol.1 (1).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani (2004). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui beberapa tahap, meliputi pengembangan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan kelompok, pemupukan modal sosial dan ekonomi, pengembangan usaha produktif, serta penyediaan informasi yang relevan. Proses pemberdayaan tersebut mencakup tahapan penyadaran, transformasi, dan pengayaan, yang secara keseluruhan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Faktor pendukung utama dalam pemberdayaan ini adalah tingginya partisipasi masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak, sementara hambatan yang dihadapi mencakup rendahnya kesadaran masyarakat terhadap potensi desa wisata. Keberhasilan program ini ditunjukkan melalui peningkatan ekonomi masyarakat, terbentuknya kerja sama yang baik dengan berbagai lembaga, serta keberlanjutan pelestarian budaya lokal.

2. Istiyanti, Dyah. 2020. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Sukawening. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*. Vol. 2 (1).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Teori yang digunakan mengacu pada konsep pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani (2004), yang mencakup tiga tahap yaitu: penyadaran, transformasi kemampuan, dan peningkatan intelektual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Desa Sukawening dilakukan melalui berbagai program seperti sosialisasi pengelolaan desa wisata, strategi pemasaran, serta pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal. Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor pendukung utama, sementara tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep desa wisata. Secara keseluruhan, pemberdayaan ini memberikan dampak positif terhadap ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, meskipun masih diperlukan penguatan kapasitas dan regulasi yang lebih jelas.

3. Wahyuni, Dinar. 2018. Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Kabupaten Gunung Kidul. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. Vol. 9 (1).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan landasan teori pemberdayaan masyarakat menurut Priyono dan Pranarka

(2016), yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Nglanggeran berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pelatihan keterampilan, dan penguatan kelembagaan. Selain itu, dukungan dari pemerintah serta sektor swasta turut berperan dalam pengembangan infrastruktur dan usaha berbasis wisata. Dampak dari strategi pemberdayaan ini terlihat dari peningkatan ekonomi masyarakat, pertumbuhan jumlah wisatawan, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunung Kidul.

4. Gautama, Budhi Pamungkas et al., 2020. Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 1 (4).

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui tahapan survei awal, pelatihan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi. Pendekatan penelitian berlandaskan pada model pemberdayaan masyarakat 7D, yang mencakup *Developing Relation*, *Discovering Capacities*, *Dreaming of Community Future*, *Directions of Community Actions*, *Designing Community Actions*, *Delivering Planned Activities*, serta *Documenting Outputs, Outcomes, and Learning*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata memerlukan

keterlibatan aktif masyarakat, dukungan dari berbagai pihak, serta peningkatan literasi desa wisata. Program yang diterapkan berhasil meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mengelola desa wisata secara profesional. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan desa wisata serta kurangnya infrastruktur pendukung. Dengan pendekatan yang tepat, pengembangan desa wisata dapat memberikan dampak positif yang terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

5. Santoso, Aldivon Antok Pratidina. 2022. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*. Vol. 7 (2).

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Landasan teoritis penelitian ini mengacu pada konsep pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo, yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Wisata di Kelurahan Kandri berjalan dengan efektif, ditandai oleh pelatihan dan sosialisasi yang berhasil meningkatkan kesadaran serta keterampilan masyarakat dalam mengelola wisata berbasis komunitas. Namun, tantangan masih ditemukan

pada aspek pendanaan dan promosi yang belum optimal. Oleh karena itu, disarankan adanya pelatihan terkait pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan strategi pemasaran dan pengelolaan desa wisata secara lebih profesional.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata umumnya menitikberatkan pada strategi dan dampak keberhasilan program pemberdayaan. Namun, masih terbatas penelitian yang menguraikan secara terintegrasi tentang bagaimana proses pemberdayaan berlangsung pada setiap tahap serta bagaimana bentuk partisipasi masyarakat terwujud dalam praktik pengelolaan desa wisata. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana proses pemberdayaan dalam setiap tahapan dan bentuk partisipasi yang dilakukan dalam pengembangan Desa Wisata Noyo Gimbal. Kebaruan penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara khusus mengkaji dinamika pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Noyo Gimbal View di Desa Bangsri. Penelitian ini tidak hanya melihat hasil pengembangan desa wisata, tetapi juga menganalisis proses pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam praktik pengelolaan yang berlangsung. Dengan demikian, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa wisata, khususnya dalam konteks pengelolaan berbasis masyarakat pada tingkat lokal.

1.5.2 Kajian Teori

1.5.2.1 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dapat dipahami sebagai suatu proses yang bertujuan meningkatkan daya guna masyarakat sehingga kondisi kehidupan mereka menjadi lebih baik (Endah, 2020:137). Pemberdayaan melibatkan upaya untuk memberikan kekuatan (*empowering*) serta penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Menurut Sumardjo dalam Endah (2020), pemberdayaan masyarakat adalah proses pengembangan kesempatan, motivasi, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mengakses sumber daya, sehingga mereka mampu meningkatkan kapasitasnya dalam menentukan masa depan sendiri serta berperan aktif dalam mempengaruhi dan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi maupun komunitasnya.

Sumodiningrat (1999) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat lebih mandiri dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Dalam proses pemberdayaan, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh perhatian atau dukungan sebagai pihak yang melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya yang ada melalui penetapan kebijakan program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Dalam

proses pemberdayaan masyarakat, pemerintah lebih menekankan pada pengembangan sumber daya manusia di pedesaan, untuk menciptakan peluang sebagai usaha untuk mencapai keinginan masyarakat sendiri dan melalui pengembangan SDM tersebut diharapkan dapat menjadi pondasi esensial bagi tumbuhnya kekuatan kolektif.

Suharto dalam Afriansyah (2023:4) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses kegiatan yang bertujuan memperkuat kelompok-kelompok yang lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang menghadapi masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan diarahkan pada tercapainya perubahan sosial yang menghasilkan masyarakat yang berdaya, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial. Hal ini mencakup peningkatan kepercayaan diri, kemampuan menyampaikan aspirasi, pemenuhan mata pencaharian, partisipasi dalam kegiatan sosial, serta kemandirian dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai usaha untuk memandirikan, mengembangkan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan melalui pengalihan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dan mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dipilihnya (Afriansyah, 2023 : 16).

Upaya pemberdayaan dapat dilakukan dan dikaji melalui tiga aspek, yaitu:

1. *Enabling* yaitu tahap penciptaan kondisi atau suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Pendekatan ini berlandaskan pada asumsi bahwa setiap individu dan komunitas memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Dengan kata lain, tidak ada individu atau masyarakat yang sepenuhnya tanpa daya. Pemberdayaan pada tahap ini berfokus pada upaya meningkatkan daya guna melalui dorongan, motivasi, serta kesadaran masyarakat terhadap potensi yang dimilikinya, sekaligus memfasilitasi pengembangan potensi tersebut.
2. *Empowering*, merupakan tahap pemberdayaan yang bertujuan memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui pelaksanaan langkah-langkah konkret, termasuk penyediaan berbagai sumber daya dan pembukaan peluang yang memungkinkan masyarakat untuk semakin mandiri dan berdaya..
3. *Protecting*, merupakan tahap yang bertujuan melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan individu maupun komunitas menjadi unsur penting dalam proses ini. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan penguatan praktik demokrasi melalui penetapan kebijakan, pembudayaan nilai-nilai demokrasi, dan pengalaman partisipatif masyarakat (Noor, 2011).

Proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan tiga tahap yaitu tahap sosialisasi, tahap transformasi kemampuan, dan tahap kemandirian.

1. Tahap sosialisasi, dimana pada tahap ini dilakukan penyadaran terhadap masyarakat. dalam konteks ini terjadi proses sosialisasi konsep desa wisata kepada masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh dukungan dan meyakinkan masyarakat bahwa desa wisata nantinya akan memberikan kebermanfaatan bagi sesama dalam segala aspek.
2. Tahap transformasi kemampuan, dimana dalam tahap ini masyarakat diberikan pelatihan dan program yang mendukung pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai desa wisata dan membentuk masyarakat yang terampil dalam mengelola desa wisata.
3. Tahap kemandirian, dimana pada tahap ini harus dilihat dari proses pemberdayaan masyarakat yang meliputi partisipasi aktif masyarakat. Dalam tahap ini, masyarakat sudah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain. Selain itu, masyarakat juga harus berpartisipasi secara aktif dalam proses perencanaan hingga tahap evaluasi. Masyarakat diharapkan sudah mampu untuk melakukan inovasi-inovasi yang nantinya akan menjadi indikator utama dalam menciptakan kemandirian (Muliawan dalam Hendryantoro, 2014:52).

Menurut Wirhatnolo dan Dwidjowijoto dalam Endah (2020), pelaksanaan pemberdayaan harus meliputi 3 tahapan pemberdayaan, yaitu :

- 1) Tahap penyadaran, tahap di mana masyarakat disadarkan bahwa merekalah subjek pembangunan serta diberikan pemahaman bahwa setiap individu memiliki potensi yang dapat dikembangkan,
- 2) Tahap pengkapasitasan, dimana tahap ini tercapai ketika masyarakat telah memiliki kemampuan untuk menerima dan memanfaatkan daya yang diberikan,
- 3) Tahap pendayaan, di mana masyarakat memperoleh daya, otoritas, atau peluang untuk berkembang sehingga dapat mencapai kemandirian. Pemberian daya pada tahap ini disesuaikan dengan kualitas dan kemampuan masing-masing individu.

Terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan masyarakat. Menurut Desiati (2013), faktor pendorong pemberdayaan masyarakat adalah: (1) adanya potensi lokal desa; (2) dukungan dari tokoh masyarakat setempat; (3) kerja sama yang terjalin antara masyarakat dan pengelola desa berjalan dengan baik; dan (4) sikap kekeluargaan yang masih kental. Sedangkan, faktor penghambat pemberdayaan masyarakat disebabkan karena adanya berbagai kekurangan seperti : (1) kesadaran masyarakat akan pentingnya program pemberdayaan; (2) pemahaman masyarakat mengenai desa wisata; (3) perhatian dari pemerintah dan dinas terkait; (4) potensi lokal yang kurang dikelola dengan baik; (5) sarana dan prasarana yang tidak memadai; (6) minimnya dana bantuan dan kurangnya fasilitas yang diberikan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha yang dilakukan untuk memandirikan masyarakat dengan memberikan dorongan, motivasi, dan memberikan kesadaran akan potensi yang dimilikinya agar lebih berdaya dan berhasil guna. Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan pembangunan yang datang dari bawah (*bottom up*) dari, untuk, dan oleh masyarakat, dimana masyarakat desa diberikan kesempatan untuk ikut aktif dalam berpartisipasi dalam proses pemberdayaan mulai dari proses perencanaan hingga proses evaluasi, karena masyarakat mampu mengidentifikasi mengenai masalah, kebutuhan, dan solusi yang sesuai dengan kondisi mereka.

1.5.2.2 Community Based Tourism (CBT)

Desa wisata merupakan aset pariwisata yang dikembangkan berdasarkan potensi pedesaan beserta keunikan dan daya tariknya. Potensi ini dapat diberdayakan dan dikelola menjadi produk wisata yang menarik minat kunjungan wisatawan ke desa tersebut (Sudibya, 2018).

Hadiwijono dalam Istiyanti (2020) menjelaskan bahwa desa wisata adalah kawasan pedesaan yang mempertahankan keaslian dan kekhasan suasananya, baik dari aspek sosial-ekonomi, sosial-budaya, adat istiadat, maupun kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Desa wisata juga dicirikan oleh arsitektur bangunan dan struktur tata ruang yang khas, aktivitas perekonomian yang menarik, serta potensi yang dapat dikembangkan

menjadi produk wisata, seperti atraksi, akomodasi, kuliner, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Terdapat beberapa pendekatan dan konsep dalam mengelola desa wisata salah satunya adalah konsep CBT atau *community based tourism* yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan pariwisata. CBT adalah pendekatan dalam pengelolaan sektor pariwisata yang menekankan keterlibatan langsung masyarakat setempat. Tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan warga, tetapi juga memastikan kelestarian lingkungan serta menjaga keberlangsungan nilai sosial dan budaya yang ada. Konsep ini selaras dengan prinsip pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) yang menuntut adanya kontribusi dan peran aktif masyarakat (Wilopo dan Hakim, 2016).

Menurut Wijaya dan Sudarmawan (2019), salah satu konsep yang menekankan peran masyarakat dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan adalah *Community Based Tourism* (CBT). Dalam konsep ini, masyarakat ditempatkan sebagai aktor utama melalui proses pemberdayaan dalam berbagai aktivitas kepariwisataan, sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara maksimal oleh komunitas lokal. Fokus utama pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pengembangan CBT didasarkan pada lima dimensi utama, yaitu : 1) Dimensi ekonomi, ditunjukkan dengan

adanya dana bagi pengembangan komunitas, terbukanya peluang kerja di sektor pariwisata, serta bertambahnya pendapatan masyarakat lokal, 2) Dimensi sosial, terlihat dari meningkatnya kualitas hidup, tumbuhnya kebanggaan komunitas, pembagian peran yang setara antara laki-laki dan perempuan maupun generasi muda dan tua, serta penguatan organisasi masyarakat, 3) Dimensi budaya, dimana CBT mendorong untuk menjaga dan melestarikan budaya yang ada, 4) Dimensi lingkungan, dimana CBT mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memelihara potensi yang dimiliki desa, 5) Dimensi politik, dimana CBT berperan dalam melindungi hak-hak masyarakat dalam mengelola sumber daya alam sekaligus memberikan kesempatan yang lebih besar dalam partisipasi publik.

Pengelolaan wisata berbasis masyarakat sangat terkait erat dengan partisipasi masyarakat, yang menjadi komponen utama dalam kegiatan pemberdayaan, di mana keduanya saling mendukung. Mubyarto dalam Laily (2015) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan individu untuk berkontribusi demi keberhasilan suatu program sesuai kemampuan masing-masing, tanpa harus mengorbankan kepentingan pribadi. Sementara itu, Rahardjo dalam Susanti (2015) menjelaskan partisipasi sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan, mencakup peran serta dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan di tingkat komunitas lokal.

Partisipasi menurut Astuti dalam Uceng (2019) adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Bentuk keterlibatan ini bisa mencakup aspek mental, emosional, dan fisik, di mana mereka memanfaatkan sepenuhnya kemampuan yang dimiliki (termasuk inisiatif) dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Selain itu, keterlibatan ini juga meliputi dukungan untuk mencapai tujuan serta kesediaan untuk bertanggung jawab atas semua peran yang diambil. Partisipasi adalah bentuk keterlibatan individu secara mental dan emosional dalam suatu kelompok, yang mendorong mereka untuk mendukung pencapaian tujuan bersama serta mengambil tanggung jawab terhadap keberhasilan kelompok tersebut.

Menurut Deviyanti (2013:382), bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, Pertama, partisipasi yang diberikan secara nyata yang dapat diberikan dalam bentuk uang, harta benda, dan tenaga. Kedua, partisipasi dalam bentuk tidak nyata atau abstrak. Partisipasi dalam bentuk tidak nyata dapat berupa ide, pikiran, pendapat, pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Terdapat beberapa bentuk partisipasi, diantaranya adalah:

1. Partisipasi dalam bentuk tenaga, yaitu kontribusi masyarakat berupa tenaga untuk mendukung kelancaran program yang ditujukan agar program yang tersebut dapat berhasil dijalankan.

2. Partisipasi dalam bentuk uang merujuk pada kontribusi masyarakat yang diberikan untuk mempermudah pencapaian tujuan suatu program pembangunan. Bentuk partisipasi ini dapat berupa sumbangan uang secara sukarela, yang diberikan oleh sebagian atau seluruh anggota masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan atau program pembangunan yang telah direncanakan.
3. Partisipasi dalam bentuk harta benda, yaitu partisipasi masyarakat yang diwujudkan dengan memberikan sumbangan berupa barang atau alat kerja yang diperlukan dalam kegiatan pembangunan (Holil dalam Deviyanti, 2013)

Tingkatan dalam partisipasi diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Partisipasi dalam perencanaan, dimana hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam rapat-rapat yang membahas program pembangunan. Hal ini mencakup sejauh mana masyarakat berperan dalam merumuskan dan menetapkan program pembangunan serta memberikan kontribusi pemikiran dalam bentuk saran mengenai pembangunan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan, dimana hal ini dapat dilihat dari bentuk konkret seperti partisipasi tenaga, uang, dan harta benda.
3. Partisipasi dalam pemanfaatan, dimana hal ini dapat terwujud melalui keterlibatan individu dalam tahap penggunaan proyek setelah dikerjakan. Dalam tahap ini, partisipasi masyarakat bisa dilakukan dalam

bentuk tenaga dan uang untuk pengelolaan operasional serta pemeliharaan pembangunan yang telah selesai.

4. Partisipasi dalam evaluasi merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam menilai dan mengawasi proses serta hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan, memberikan masukan, kritik, dan saran (Soetomo, 2008).

Terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat. Menurut Deviyanti (2013), faktor pendorong partisipasi masyarakat yaitu: 1) adanya kemauan dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi, 2) kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, dan 3) kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi. Sedangkan, faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat adalah : 1) rasa ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan, 2) kurangnya kesadaran masyarakat dan faktor internal seperti usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, dan lamanya menetap di suatu daerah sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat, 3) faktor eksternal yang disebabkan tidak adanya tokoh yang mempunyai pengaruh besar yang sangat signifikan terhadap keberhasilan program dan tidak dapat menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep partisipasi masyarakat sangat penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat, karena partisipasi bukan hanya tentang memberikan kontribusi

berupa harta benda, tetapi juga berfokus pada pengembangan kapasitas masyarakat secara menyeluruh. Dengan adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan hingga pengelolaan, maka desa wisata akan memiliki potensi yang besar untuk tidak hanya meningkatkan ekonomi lokal, tetapi juga melestarikan nilai-nilai budaya dan lingkungan setempat.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini bertujuan untuk menerjemahkan konsep pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat ke dalam indikator-indikator yang dapat dilihat secara nyata dalam konteks pengembangan Desa Wisata Noyo Gimbal View Bangsri.

- a) Pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini dipahami sebagai proses yang dilakukan untuk memandirikan masyarakat dengan cara memberikan dorongan, motivasi, dan kesadaran akan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat mampu mengelola desa wisata secara berkelanjutan. Proses pemberdayaan meliputi tahap sosialisasi, transformasi kemampuan melalui pelatihan dan pendampingan, hingga tahap kemandirian dalam mengelola potensi wisata.
- b) Dalam kerangka CBT, partisipasi masyarakat dimaknai sebagai bentuk keikutsertaan aktif warga dalam mendukung pengembangan desa wisata baik secara nyata maupun tidak nyata. Partisipasi yang diberikan secara nyata dapat diberikan dalam bentuk uang, harta benda, dan tenaga. Sedangkan partisipasi

dalam bentuk tidak nyata atau abstrak diberikan dalam bentuk ide, pikiran, pendapat, pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Dengan demikian, indikator-indikator dalam tabel operasionalisasi konsep berikut dirumuskan berdasarkan tahapan pemberdayaan masyarakat dan bentuk partisipasi, agar penelitian ini dapat mengetahui pengembangan Desa Wisata Noyo Gimbal View Bangsri secara komprehensif.

Tabel 1.2 Operasionalisasi Konsep

Aspek	Sub-Aspek/Dimensi	Penjelasan	Indikator
Pemberdayaan Masyarakat	Sosialisasi	Pemerintah desa mengenalkan konsep pemberdayaan melalui desa wisata kepada masyarakat, termasuk program dan tujuan yang akan dicapai.	1. Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi. 2. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep desa wisata.
	Transformasi Kemampuan	Upaya pemberian pelatihan dan pendampingan untuk menggali serta mengembangkan potensi masyarakat.	1. Jenis program pelatihan yang diberikan. 2. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pelatihan 3. Peningkatan keterampilan SDM setelah pelatihan. 4. Tersedianya pendampingan berkelanjutan.

	Kemandirian	Masyarakat diberi kewenangan untuk mengelola desa wisata secara mandiri, baik dari aspek atraksi, fasilitas, maupun pengelolaan dana.	1. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana, atraksi, akses, dan fasilitas wisata. 2. Kemampuan masyarakat berinovasi dalam pengembangan wisata. 3. Tingkat kemandirian masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata. 4. Kualitas layanan, fasilitas, dan tata kelola wisata
Partisipasi Masyarakat	Partisipasi Nyata (Langsung)	Keterlibatan masyarakat secara langsung dengan memberikan kontribusi berupa tenaga, uang dan harta benda dalam program pemberdayaan dan pengelolaan wisata.	1. Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap. 2. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan fisik pengelolaan desa wisata 3. Sumbangan finansial atau pemanfaatan harta benda/aset pribadi masyarakat untuk kegiatan desa wisata.

	Partisipasi Tidak Nyata (Abstrak)	Keterlibatan masyarakat secara tidak langsung dengan memberikan kontribusi berupa ide, pendapat, dan pikiran dalam program pemberdayaan dan pengelolaan wisata.	1. Keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah atau forum diskusi terkait pengembangan pengelolaan desa wisata. 2. Penyampaian ide, saran, atau pendapat masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi desa wisata. 3. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
--	-----------------------------------	---	--

1.7 Argumen Penelitian

Pengembangan desa wisata memiliki potensi yang besar untuk memberikan berbagai dampak positif dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Pemberdayaan tersebut terwujud seiring dengan proses pengembangan desa wisata yang dilakukan dari tahap sosialisasi, transformasi kemampuan, hingga tahap kemandirian. Pemberdayaan masyarakat tidak akan berhasil apabila tingkat partisipasi masyarakat rendah dalam mengikuti berbagai program pemberdayaan yang dilakukan dalam upaya pengembangan desa wisata. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat di Desa Bangsri tentu saja tidak lepas dari berbagai program pemberdayaan yang dilakukan, partisipasi masyarakat, serta sinergi yang kuat dari

berbagai *stakeholders*. Melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif, Desa Wisata Bangsri berhasil menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal. Keberhasilan Desa Wisata Noyo Gimbal View menjadi contoh nyata bahwa masyarakat yang berdaya, masyarakat yang partisipatif dan dukungan dari berbagai *stakeholders* dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan desa wisata.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Fokus utama penelitian ini adalah memberikan gambaran terkait upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Noyo Gimbal View Bangsri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi faktual dengan menekankan pada pemaparan hasil temuan di lapangan serta menganalisis secara mendalam pola pemberdayaan yang diterapkan di Desa Wisata Noyo Gimbal View Bangsri. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, melalui pengamatan, wawancara, dan pengkajian yang terfokus pada rumusan pertanyaan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan penelitian berjalan terarah dan menghasilkan data yang relevan dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

1.8.2 Situs Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Bangsri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Lokasi ini dipilih peneliti karena peneliti tertarik dengan

program pemberdayaan yang dilakukan di Desa Wisata Noyo Gimbal View Bangsri. Peneliti juga tertarik dengan proses pengelolaan potensi desa sehingga mampu memberikan kebermanfaatan dalam berbagai sektor kehidupan desa dan masyarakat setempat.

1.8.3 Subjek Penelitian

Penelitian ini membutuhkan subjek atau informan yang memiliki pemahaman mendalam mengenai persoalan yang akan diteliti. Subjek yang dipilih adalah individu atau kelompok yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengembangan desa wisata di Desa Wisata Noyo Gimbal View Bangsri serta pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pemberdayaan di kawasan tersebut. Dari subjek tersebut, peneliti akan mengumpulkan informasi dan data melalui wawancara serta observasi untuk mendukung pemahaman terhadap topik yang dibahas. Subjek pada penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Desa Bangsri;
2. Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Blora
3. BUMDes Maju Mapan Bangsri;
4. Masyarakat Desa Wisata Bangsri yang terlibat dalam pengelolaan usaha dan potensi daya tarik wisata di Desa Wisata Bangsri.

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan mengandalkan data berupa teks atau narasi tertulis yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Data tersebut kemudian diinterpretasikan oleh

peneliti untuk menganalisis proses pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Noyo Gimbal View Bangsri. Hasil wawancara didukung oleh temuan dari kegiatan observasi dan dokumentasi yang dilakukan selama penelitian berlangsung.

1.8.5 Sumber Data

Sumber-sumber informasi yang digunakan dalam menyusun data yang digunakan dalam analisis penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa Bangsri, Dinas Pariwisata Kabupaten Blora, BUMDes Maju Mapan Bangsri, Masyarakat Desa Wisata Bangsri yang terlibat dalam pengelolaan usaha dan potensi daya tarik wisata di Desa Wisata Bangsri.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan bahan pustaka yang relevan. Dokumen tersebut meliputi data pengunjung Noyo Gimbal View, dokumentasi kegiatan, dokumen gambaran umum Desa Bangsri serta data penduduk Desa Bangsri. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber berupa buku, jurnal, skripsi dan penelitian terdahulu yang membantu menginterpretasikan data primer. Kombinasi kedua jenis data ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih

mendalam mengenai proses pemberdayaan masyarakat menuju pengembangan Desa Wisata Noyo Gimbal View.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu observasi lapangan dengan pengamatan mendalam terhadap subjek dan objek penelitian, studi dokumentasi, serta wawancara mendalam yang melibatkan interaksi langsung dengan berbagai narasumber yang terkait.

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian di Desa Wisata Noyo Gimbal View Bangsri sebagai lokasi utama penelitian. Observasi ini bertujuan untuk memahami situasi, tindakan, serta memastikan kesesuaian antara kondisi yang diamati dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada 4 subjek penelitian yang terdiri dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Blora, Kepala Desa Bangsri, BUMDes Bangsri dan masyarakat Bangsri yang terlibat dalam pengelolaan usaha dan potensi daya tarik wisata di Desa Wisata Bangsri.

c. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data berupa dokumentasi kegiatan wisata, data pengunjung wisata, data penduduk Bangsri, serta dokumen pengembangan wisata milik BUMDes Maju Mapan Bangsri. Dokumentasi ini tidak hanya

berfungsi sebagai pelengkap wawancara tetapi juga membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik penelitian.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang mencakup beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Proses reduksi data dilakukan peneliti sejak awal penelitian. Proses reduksi data meliputi kegiatan merangkum informasi dengan analisis yang lebih mendalam, mengelompokkan data pemberdayaan dan partisipasi, mengarahkan temuan penelitian, mengatur data secara sistematis, serta mengeliminasi bagian yang dianggap tidak relevan dalam penelitian, sehingga nantinya memudahkan dalam menarik sebuah kesimpulan.

b. Penyajian Data

Proses setelah peneliti melakukan reduksi data, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk yang lebih terorganisir dan informatif. Penyajian data dilakukan melalui narasi deskriptif, catatan lapangan, dan table untuk memudahkan pemahaman dan analisis. Penyajian ini membantu peneliti dalam menganalisis dan menemukan temuan penting dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam penelitian, di mana peneliti merumuskan hasil penelitian dengan cara memperinci dan meninjau ulang temuan yang dihasilkan. Kesimpulan yang dihasilkan mencerminkan jawaban atas fokus penelitian dan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan.

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data dihasilkan dari proses triangulasi data yang dilakukan dengan mengintegrasikan data dari wawancara, dokumentasi, dan obeservasi untuk memastikan konsistensi temuan. Tahapan analisis dalam menentukan kualitas data merupakan bagian yang penting dalam penelitian kualitatif. Tahapan ini dilakukan melalui penelaahan ulang terhadap data yang telah diperoleh, penilaian terhadap relevansi dan signifikansi data, pengelompokan data berdasarkan kesamaan karakteristik, identifikasi pola yang muncul antar data, serta penarikan esensi dari setiap data yang dikumpulkan.